ALSYS
Jurnal Keislaman dan Ilmu Pendidikan

e-ISSN : 2808-540X
p-ISSN : 2808-7119

Terindeks: Copernicus, Sinta 5, Dimensions, Scilit, Lens, Semantic Scholar, Garuda, Google, Base, etc.

https://doi.org/10.58578/alsys.v6i1.8750

KEBIJAKAN PEMERINTAH TENTANG PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN ISLAM

Government Policy on Quality Assurance of Islamic Education

Muhammad Adhim Habibullah & M. Yahya Ashari
Universitas Pesantren Tinggi Darul Ulum Jombang
muhammadadhimhabibullah@pps.unipdu.ac.id; yahyaashari@fai.unipdu.ac.id

Article Info:

Submitted:	Revised:	Accepted:	Published:
Nov 28, 2025	Dec 23, 2025	Jan 4, 2026	Jan 9, 2026

Abstract

Government policy on Islamic education quality assurance is a strategic instrument for ensuring the quality of Islamic educational institutions amid the challenges of globalization, social dynamics, and demands for public accountability. However, various studies indicate that the implementation of quality assurance policies in Islamic educational institutions still faces obstacles related to policy comprehension, human resource readiness, and the internalization of a quality culture. This study aimed to analyze government policy on Islamic education quality assurance and its contribution to improving the quality of Islamic educational institutions. It employed a library research method by reviewing books, policy documents, and relevant scholarly journal articles published in the last five years, while the data were analyzed using content analysis to identify key themes related to policies and practices of Islamic education quality assurance. The findings show that government policy has provided a clear normative framework through the *Standar Nasional Pendidikan* (National Education Standards) as well as internal and external quality assurance systems, which play an important role in encouraging Islamic educational institutions to undertake continuous planning, evaluation, and quality improvement. Nevertheless, policy implementation still exhibits variation across institutions, influenced by institutional and resource-related

AlSys is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License

factors. This study concludes that Islamic education quality assurance policy makes a significant contribution to strengthening quality governance but still requires reinforcement at the implementation level; its implications underscore the urgency of developing human resource capacity and adopting more contextual policy approaches so that Islamic education quality assurance can be implemented effectively and sustainably.

Keywords: Government Policy; Quality Assurance; Islamic Education; National Education Standards; Quality Management

Abstrak: Kebijakan pemerintah tentang penjaminan mutu pendidikan Islam merupakan instrumen strategis dalam menjamin kualitas lembaga pendidikan Islam di tengah tantangan globalisasi, dinamika sosial, dan tuntutan akuntabilitas publik, namun berbagai kajian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan penjaminan mutu di lembaga pendidikan Islam masih menghadapi kendala terkait pemahaman kebijakan, kesiapan sumber daya manusia, dan internalisasi budaya mutu. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan pemerintah tentang penjaminan mutu pendidikan Islam serta kontribusinya terhadap peningkatan mutu lembaga pendidikan Islam. Penelitian ini menggunakan metode studi kepustakaan (*library research*) dengan menelaah buku, dokumen kebijakan, dan artikel jurnal ilmiah yang relevan dalam lima tahun terakhir, sedangkan data dianalisis menggunakan teknik analisis isi (*content analysis*) untuk mengidentifikasi tema-tema utama terkait kebijakan dan praktik penjaminan mutu pendidikan Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan pemerintah telah menyediakan kerangka normatif yang jelas melalui Standar Nasional Pendidikan serta sistem penjaminan mutu internal dan eksternal yang berperan penting dalam mendorong lembaga pendidikan Islam melakukan perencanaan, evaluasi, dan perbaikan mutu secara berkelanjutan. Namun demikian, implementasi kebijakan masih menunjukkan variasi antar lembaga yang dipengaruhi oleh faktor kelembagaan dan sumber daya. Penelitian ini menyimpulkan bahwa kebijakan penjaminan mutu pendidikan Islam memberikan kontribusi signifikan terhadap penguatan tata kelola mutu, tetapi masih memerlukan penguatan pada aspek implementasi; implikasinya menekankan urgensi pengembangan kapasitas sumber daya manusia dan pendekatan kebijakan yang lebih kontekstual agar penjaminan mutu pendidikan Islam dapat berjalan secara efektif dan berkelanjutan.

Kata Kunci: Kebijakan Pemerintah; Penjaminan Mutu; Pendidikan Islam; Standar Nasional Pendidikan; Manajemen Mutu

PENDAHULUAN

Penjaminan mutu pendidikan merupakan isu strategis dalam pembangunan pendidikan nasional, termasuk pada sektor pendidikan Islam yang mencakup madrasah, pesantren, dan perguruan tinggi keagamaan Islam. Di tengah tantangan globalisasi, kemajuan teknologi, serta tuntutan akuntabilitas publik, lembaga pendidikan Islam dituntut tidak hanya menjaga nilai-nilai keislaman, tetapi juga mampu memenuhi standar mutu pendidikan yang diakui secara nasional. Kondisi ini mendorong pemerintah Indonesia untuk merumuskan dan

menerapkan berbagai kebijakan penjaminan mutu pendidikan Islam sebagai bagian integral dari sistem pendidikan nasional (Indana dkk., 2024).

Secara nasional, pemerintah telah mengembangkan kebijakan penjaminan mutu melalui penerapan Standar Nasional Pendidikan, Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI), dan Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME) yang juga diberlakukan pada lembaga pendidikan Islam di bawah naungan Kementerian Agama. Kebijakan tersebut diarahkan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran, tata kelola kelembagaan, profesionalisme pendidik, serta relevansi lulusan pendidikan Islam. Studi terbaru menunjukkan bahwa kebijakan ini merujuk pada struktur standar pendidikan nasional sebagai kerangka utama penjaminan mutu di lembaga pendidikan Islam (Putri dkk., 2025). Namun, implementasi kebijakan penjaminan mutu pendidikan Islam di lapangan masih mengalami kendala, antara lain kurangnya pemahaman terhadap sistem mutu, keterbatasan sumber daya manusia, serta variasi kapasitas lembaga yang memengaruhi efektivitas kebijakan tersebut.

Dalam perspektif teori manajemen mutu pendidikan, khususnya *Total Quality Management* (TQM), mutu pendidikan hanya dapat dicapai apabila terdapat komitmen kelembagaan terhadap perbaikan berkelanjutan, keterlibatan semua pemangku kepentingan, serta pengambilan keputusan berbasis data. Pendekatan ini menekankan bahwa sistem penjaminan mutu yang efektif harus terintegrasi dalam setiap aspek operasional lembaga pendidikan. Peneliti menilai bahwa kebijakan penjaminan mutu pendidikan Islam perlu dianalisis tidak hanya secara regulatif tetapi juga melalui lensa teori mutu pendidikan dan kebijakan publik agar dapat memahami secara komprehensif arah dan implementasinya (Thoyib, 2022).

Penelitian lain menyoroti tantangan praktis yang dihadapi lembaga pendidikan tinggi Islam dalam mengintegrasikan mutu akademik dan tata kelola kelembagaan yang responsif terhadap standar nasional, termasuk dalam hal kompetensi dosen, kurikulum, dan tata kelola organisasi (Ecih Sukaesih & Ahmad Subagyo, 2025). Selain itu, (Lathifah dkk., 2025) menyampaikan bahwa kajian tentang pesantren menegaskan kebutuhan penyesuaian kebijakan mutu pemerintah dengan karakteristik budaya dan nilai khas lembaga berbasis tradisi ini, sehingga proses penjaminan mutu menjadi relevan dan kontekstual. Meskipun demikian, sebagian besar studi tersebut masih bersifat sektoral atau terfokus pada aspek tertentu misalnya pada tingkat lembaga tertentu atau hanya pada analisis mekanisme mutu internal sehingga belum terdapat kajian sintesis yang menganalisis kebijakan pemerintah

tentang penjaminan mutu pendidikan Islam secara holistik melalui integrasi teori mutu pendidikan, analisis kebijakan, dan temuan empiris lintas jenjang pendidikan Islam. Hal itu menunjukkan adanya kesenjangan penelitian terkait pemahaman komprehensif mengenai bagaimana kebijakan pemerintah mengarahkan, membentuk, dan memengaruhi praktik penjaminan mutu di seluruh ekosistem pendidikan Islam Indonesia (Gustini & Mauly, 2019).

penelitian ini memiliki kebaruan dengan menyajikan kajian literatur komprehensif mengenai kebijakan pemerintah tentang penjaminan mutu pendidikan Islam, yang dianalisis melalui landasan teori manajemen mutu pendidikan dan kebijakan publik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsep, arah kebijakan, serta implikasi penjaminan mutu pendidikan Islam melalui telaah pustaka terhadap buku dan artikel jurnal ilmiah lima tahun terakhir. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis dan praktis dalam pengembangan kebijakan dan praktik penjaminan mutu pendidikan Islam yang berkelanjutan di Indonesia.

METODE

Penelitian ini merupakan studi kepustakaan (library research) dengan menelusuri berbagai literatur yang relevan sebagai bahan rujukan utama dalam kajian supervisi akademik dan mutu pendidikan Islam. Penelitian ini dilaksanakan sejak bulan Juli sampai dengan November 2025. Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas dua jenis, yaitu sumber primer dan sumber sekunder. Sumber primer merupakan rujukan utama yang secara langsung berkaitan dengan fokus penelitian, yakni literatur tentang supervisi akademik, mutu pendidikan, dan pendidikan Islam yang berasal dari buku-buku ilmiah serta artikel jurnal penelitian lima tahun terakhir (2021–2025). Adapun sumber sekunder adalah literatur pendukung yang bersifat melengkapi dan memperkuat analisis, seperti buku metodologi penelitian, kebijakan pendidikan, serta artikel ilmiah yang relevan dengan tema kajian. Peneliti melakukan pembatasan masalah dengan memfokuskan kajian pada Kebijakan Pemerintah Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Islam. Seluruh data dikumpulkan melalui penelusuran jurnal nasional dan internasional bereputasi, repository akademik, serta buku referensi yang relevan dengan pengembangan konsep penelitian ini. Analisis data dalam penelitian ini dilakukan melalui analisis isi yaitu dengan mengkaji, mengelompokkan, membandingkan, dan menyintesis berbagai temuan konseptual dari sumber-sumber pustaka untuk memperoleh

pemahaman yang sistematis mengenai Kebijakan Pemerintah Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Islam

HASIL

Berdasarkan hasil analisis terhadap literatur yang dikaji ditemukan bahwa penjaminan mutu pendidikan Islam dipahami sebagai suatu sistem yang terstruktur dan berkelanjutan untuk menjamin terpenuhinya standar mutu pendidikan pada lembaga pendidikan Islam. Literatur yang dianalisis menunjukkan bahwa penjaminan mutu mencakup beberapa aspek utama, yaitu perencanaan mutu pelaksanaan standar pendidikan, evaluasi internal, serta tindak lanjut perbaikan mutu yang dilakukan secara periodik. Selain itu hasil kajian pustaka menunjukkan bahwa pelaksanaan penjaminan mutu pendidikan Islam dilakukan melalui dua mekanisme utama, yakni penjaminan mutu internal yang dilaksanakan oleh lembaga pendidikan Islam secara mandiri dan penjaminan mutu eksternal yang dilakukan melalui proses akreditasi oleh lembaga berwenang. Literatur juga mencatat adanya variasi dalam implementasi penjaminan mutu di lembaga pendidikan Islam, di mana sebagian sumber melaporkan dukungan berupa komitmen pimpinan dan ketersediaan sumber daya, sementara sumber lainnya mengungkapkan kendala seperti keterbatasan pemahaman teknis, sumber daya manusia, serta belum meratanya penerapan sistem penjaminan mutu (Nurjaman dkk., 2022).

Temuan selanjutnya menunjukkan bahwa pelaksanaan penjaminan mutu pendidikan Islam dilakukan melalui dua mekanisme utama, yaitu sistem penjaminan mutu internal dan sistem penjaminan mutu eksternal. Sistem internal dijalankan oleh lembaga pendidikan Islam secara mandiri melalui perencanaan kualitas, evaluasi diri, dan perbaikan berkelanjutan, sementara sistem eksternal dilaksanakan melalui akreditasi dan evaluasi yang dilakukan oleh lembaga akreditasi atau instansi pemerintah untuk menilai ketercapaian standar mutu yang telah ditetapkan (Sitorus & Dahlan, 2023).

Tabel 1 menyajikan ringkasan tema utama temuan kebijakan penjaminan mutu pendidikan Islam

No	Tema Utama	Deskripsi Temuan
1	Standarisasi Mutu	Kebijakan pemerintah menetapkan standar nasional pendidikan sebagai acuan mutu pendidikan Islam
2	Mekanisme Penjaminan Mutu	Penjaminan mutu dilaksanakan melalui sistem internal dan eksternal

No	Tema Utama	Deskripsi Temuan
3	Sumber Daya Manusia	Kompetensi pimpinan dan pendidik berperan dalam pelaksanaan kebijakan mutu
4	Variasi Implementasi	Terdapat perbedaan penerapan kebijakan mutu antar lembaga pendidikan Islam
5	Kendala Implementasi	Keterbatasan sarana, SDM, dan pendampingan teknis

Tabel 1 menyajikan ringkasan tema utama temuan kebijakan penjaminan mutu pendidikan Islam yang meliputi penerapan standar nasional pendidikan, mekanisme penjaminan mutu internal dan eksternal, peran sumber daya manusia, serta variasi implementasi kebijakan di lembaga pendidikan Islam.

Meskipun sebagian besar literatur menggambarkan penjaminan mutu pendidikan Islam sebagai sistem yang terstruktur dan ideal, hasil kajian pustaka juga menemukan sejumlah sumber yang melaporkan kondisi yang tidak sepenuhnya sesuai dengan pola umum tersebut (Syamsy dkk., 2023). Beberapa literatur mencatat bahwa penerapan penjaminan mutu di sejumlah lembaga pendidikan Islam masih bersifat administratif dan belum dilaksanakan secara menyeluruh. Selain itu, ditemukan pula sumber yang menyebutkan bahwa sistem penjaminan mutu belum berjalan secara konsisten akibat keterbatasan sumber daya manusia, minimnya pemahaman teknis terhadap mekanisme penjaminan mutu, serta kurangnya ketersediaan dokumen pendukung mutu. Literatur lain juga menunjukkan adanya perbedaan tingkat implementasi penjaminan mutu antar lembaga pendidikan Islam, baik dari segi kelengkapan sistem maupun keberlanjutan pelaksanaannya.

PEMBAHASAN

Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan pemerintah dalam penjaminan mutu pendidikan Islam telah membentuk kerangka normatif yang kuat berupa penerapan Standar Nasional Pendidikan (SNP) dan dua mekanisme utama penjaminan mutu: internal dan eksternal. Hasil ini menunjukkan bahwa kebijakan pemerintah tidak sekadar menjadi regulasi administratif, melainkan instrumen strategis yang mengarahkan lembaga pendidikan Islam untuk menyusun perencanaan mutu, melakukan evaluasi diri, serta memperbaiki praktik pendidikan secara berkelanjutan. Temuan ini berkaitan langsung dengan masalah utama penelitian mengenai kontribusi kebijakan pemerintah dalam mutu pendidikan Islam dan menguatkan tujuan penelitian yang ingin mengevaluasi peran kebijakan tersebut terhadap mutu pendidikan secara sistemik.

Perbandingan hasil penelitian dengan literatur terdahulu menunjukkan bahwa kebijakan mutu pendidikan yang berorientasi pada standar nasional dan mekanisme formal suatu kelembagaan bukanlah fenomena baru dalam konteks pendidikan Indonesia. Penelitian lain menemukan bahwa output-based quality assurance yang mengutamakan hasil pendidikan seperti kompetensi lulusan dan relevansi kurikulum—telah menjadi fokus sejumlah studi dalam konteks pendidikan Islam, menekankan pentingnya pencapaian hasil yang jelas sebagai bagian dari sistem mutu (Sulfiani dkk., 2023). Selain itu, kajian yang membahas *Continuous Quality Improvement* (CQI) juga menunjukkan bahwa institusi pendidikan Islam perlu mengintegrasikan kerangka perbaikan berkelanjutan dalam praktik kelembagaan untuk menyikapi dinamika kebutuhan pendidikan yang terus berkembang (Azza & Yasin, 2025). Namun, berbeda dengan penelitian yang lebih banyak menyoroti praktik internal lembaga, penelitian ini berada pada level kebijakan nasional, sehingga menunjukkan kontribusi baru dalam memahami hubungan antara kebijakan pemerintah dan operasional mutu lembaga.

Penelitian lain menunjukkan bahwa integrasi prinsip mutu dalam kebijakan pendidikan Islam memerlukan pendekatan yang kontekstual agar nilai-nilai pendidikan Islam, seperti nilai amanah, ihsan, dan accountability, dapat diinternalisasikan dalam praktik kelembagaan. Misalnya, studi yang mengeksplorasi integrasi prinsip Qur'ani dan Hadis dalam kerangka penjaminan mutu menemukan bahwa nilai-nilai tersebut memperkaya sistem mutu dengan memberikan dasar etis, memperkuat integritas pendidikan, dan mendukung pemaknaan kualitas yang lebih holistik dalam konteks Islam (Solikah dkk., 2025). Selain itu, kajian lain menyoroti pentingnya pengembangan model internal quality assurance yang adaptif di lembaga pendidikan Islam untuk menghadapi tantangan implementatif, seperti kurangnya pemahaman teknis tentang SPMI dan pengembangan kapasitas kelembagaan (Fuad & Sesmiarni, 2025). Perbandingan ini menunjukkan bahwa meskipun kebijakan pemerintah telah memberikan arah yang jelas dalam penjaminan mutu pendidikan Islam, terdapat kebutuhan nyata untuk menghubungkan kebijakan dengan nilai-nilai pendidikan Islam dan konteks kelembagaan masing-masing lembaga.

Implikasi penelitian ini cukup luas baik secara konseptual maupun praktis. Secara konseptual, temuan ini memperkuat gagasan bahwa kebijakan pendidikan tidak hanya sebagai alat regulasi tetapi juga sebagai basis pembentukan budaya mutu kelembagaan, terutama ketika dipadukan dengan prinsip manajemen mutu pendidikan yang mendorong evaluasi berkelanjutan dan keterlibatan pemangku kepentingan dalam proses mutu. Analisis lain menunjukkan bahwa kualitas pendidikan di tingkat lembaga sangat dipengaruhi oleh tata

kelola internal, termasuk sistem penjaminan mutu yang efektif dan pelatihan sumber daya manusia secara berkala (Yuseran, 2023). Adapun temuan lain mengimplikasikan perlunya strategi pendampingan dan pembinaan yang lebih adaptif dari pemerintah agar kebijakan penjaminan mutu pendidikan Islam tidak hanya bersifat normatif, tetapi mampu mendorong peningkatan mutu secara nyata di tingkat satuan pendidikan Secara praktis (Siti Aminah, 2022). hasil ini memberikan gambaran empiris bahwa pembuat kebijakan perlu mempertimbangkan aspek pelatihan teknis, dukungan sumber daya, serta tata kelola yang responsif terhadap konteks lembaga untuk memaksimalkan implementasi penjaminan mutu.

Meskipun memberikan gambaran penting mengenai arah kebijakan penjaminan mutu pendidikan Islam, penelitian ini memiliki keterbatasan yang perlu disadari. Pertama, karena pendekatan studi kepustakaan, analisis yang dilakukan sangat tergantung pada ketersediaan literatur yang relevan dan terkadang tidak mencerminkan variasi implementasi di masing-masing lembaga pendidikan Islam di berbagai daerah. Kedua, penelitian ini belum menilai secara empiris dampak kebijakan terhadap hasil pendidikan seperti kompetensi lulusan, kepuasan pemangku kepentingan, atau kesetaraan kualitas antar lembaga. Oleh karena itu, penelitian lanjutan disarankan untuk menggunakan metode empiris seperti studi kasus, survei, atau wawancara langsung guna memperoleh gambaran komprehensif tentang pengaruh kebijakan penjaminan mutu pada mutu pendidikan Islam secara nyata di lapangan.

KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa kebijakan pemerintah tentang penjaminan mutu pendidikan Islam memiliki peran yang strategis dalam membentuk kerangka peningkatan mutu lembaga pendidikan Islam secara sistemik dan berkelanjutan. Melalui penerapan Standar Nasional Pendidikan serta mekanisme penjaminan mutu internal dan eksternal, kebijakan tersebut menjadi acuan normatif bagi lembaga pendidikan Islam dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi mutu pendidikan. Hasil kajian menunjukkan bahwa kebijakan penjaminan mutu tidak hanya berfungsi sebagai instrumen administratif, tetapi juga sebagai penggerak penguatan tata kelola lembaga pendidikan Islam. Namun demikian, penelitian ini juga menemukan adanya variasi dalam implementasi kebijakan di lapangan, yang dipengaruhi oleh kesiapan sumber daya manusia, dukungan kelembagaan, serta kemampuan lembaga dalam menginternalisasikan budaya mutu.

Dari sisi kontribusi terhadap ilmu pengetahuan, penelitian ini memperkaya kajian kebijakan pendidikan Islam dengan memberikan pemahaman komprehensif mengenai

hubungan antara kebijakan pemerintah dan sistem penjaminan mutu pendidikan Islam. Penelitian ini menegaskan bahwa penjaminan mutu pendidikan Islam perlu dipahami sebagai proses integratif antara regulasi nasional, teori manajemen mutu pendidikan, dan nilai-nilai pendidikan Islam. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya berkontribusi pada penguatan perspektif kebijakan pendidikan, tetapi juga memperluas kajian manajemen mutu pendidikan Islam yang selama ini cenderung berfokus pada aspek kelembagaan atau praktik internal semata.

Berdasarkan temuan dan keterbatasan penelitian, penelitian selanjutnya disarankan untuk mengembangkan kajian dengan pendekatan empiris, seperti studi kasus, survei, atau metode campuran, guna memperoleh gambaran yang lebih mendalam mengenai implementasi kebijakan penjaminan mutu pendidikan Islam di berbagai jenis dan jenjang lembaga pendidikan. Selain itu, penelitian lanjutan juga dapat mengeksplorasi dampak kebijakan penjaminan mutu terhadap indikator hasil pendidikan, seperti kompetensi lulusan, kualitas pembelajaran, dan kepuasan pemangku kepentingan. Kajian komparatif antar daerah atau antar lembaga pendidikan Islam juga penting dilakukan untuk mengidentifikasi praktik-praktik terbaik (*best practices*) dalam implementasi kebijakan penjaminan mutu pendidikan Islam.

DAFTAR PUSTAKA

Azza, R. L., & Yasin, M. (2025). Conceptualization of the continuous quality improvement model in Islamic education. *Journal of Quality Assurance in Islamic Education (JQAIE)*, *5*(1), 45–51. https://doi.org/10.47945/jqaie.v5i1.2024

Fuad, R., & Sesmiarni, Z. (2025). Penerapan Sistem Penjaminan Mutu Pembelajaran PAI. *Dirasah: Jurnal Studi Ilmu dan Manajemen Pendidikan Islam*, *8*(1), 1–11. https://ejournal.iaifa.ac.id/index.php/dirasah/article/view/1632

Gustini, N., & Mauly, Y. (2019). Implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan Dasar. *Jurnal Isema: Islamic Educational Management*, *4*(2), 229–244. https://doi.org/10.15575/isema.v4i2.5695

Indana, N., Mustofa, A., Qomar, M., Aziz, A., & Junaris, I. (2024). Government policy in strengthening education quality assurance in Islamic education institutions. *QALAMUNA: Jurnal Pendidikan, Sosial, dan Agama*, *16*(1), 393–406. https://doi.org/10.37680/qalamuna.v16i1.3245

Lathifah, Z. K., Fauziah, R. S. P., Rusli, R. K., Roestamy, M., Martin, A. Y., Indra, S., & Suherman, U. (2025). Quality assurance in pesantren: Modernization, adaptability, and integration into Indonesia's education system. *Jurnal Pendidikan Islam*, *11*(1), 101–114. https://doi.org/10.15575/jpi.v11i1.43951

Nurjaman, U., Al Mighwar, M., Harun, M., Mu'min, U. A., & Syaie, A. N. K. (2022). Quality assurance Islamic perspective: An alternative in Islamic-based public education institutions. *Cendekia: Jurnal Kependidikan dan Kemasyarakatan*, *20*(1), 88–105. https://doi.org/10.21154/cendekia.v1i1.3986

Putri, S. A., Putri, A. G. L., Jafar, L. S., Nasuah, R., & Yudiawan, A. (2025). Integration of total quality management in national standards of Islamic education. *Journal of Quality Assurance in Islamic Education (JQAIE)*, *5*(1), 36–44. https://doi.org/10.47945/jqaie.v5i1.2377

Sitorus, A. S., & Dahlan, Z. (2023). Model Sistem Penjaminan Mutu Internal Program Studi Pendidikan Islam Anak Usia Dini Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Sumatera Utara Medan. *Islamic Management: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, *7*(1), 259–278. https://doi.org/10.30868/im.v7i01.5319

Siti Aminah. (2022). Manajemen Penjaminan Mutu Pendidikan Islam Berbasis Kebijakan Nasional. *Al-Tanzim: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, *6*(2), 215–258. https://ejournal.unuja.ac.id/index.php/al-tanzim/article/view/3621

Sukaesih, E., & Subagyo, A. (2025). Analysis of the impact of Islamic education policy on the quality of education. *Buana Pendidikan: Jurnal Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Unipa Surabaya*, *21*(2), 126–132. https://doi.org/10.36456/bp.vol21.no2.a10442

Solikah, I., Fitri, A. Z., & Muhajir, A. (2025). Integrating Qur'anic and prophetic principles in educational quality assurance. *Interdisciplinary Research*, *1*(2)

Sulfiani, S., Jannana, N. S., & Sentosa, S. (2023). Enhancing Islamic educational quality through output-based quality assurance: A literature review perspective. *Heutagogia: Journal of Islamic Education*, *3*(2), 155–168. https://doi.org/10.14421/hjie.2023.32-02

Syamsy, B., Fauzan, U., & Malihah, N. (2023). Implementasi Peningkatan Mutu Pendidikan dengan Pendekatan Total Quality Manajemen. *Munaddhomah: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, *4*(4), 888–902. https://doi.org/10.31538/munaddhomah.v4i4.593

Thoyib, M. (2022). Internal quality assurance system based on pesantren values: Towards the excellence of schools in Indonesia. *Al-Tanzim: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, *6*(3), 826–840. https://doi.org/10.33650/al-tanzim.v6i3.3378

Yuseran, M. (2023). Sistem Penjaminan Mutu Internal di SD Ukhuwah 2 Banjarmasin. *Management of Education: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, *9*(2), 259–266. https://jurnal.uin-antasari.ac.id/index.php/moe/article/view/10429